LAPORAN RAKOR PENGENDALIAN TINGKAT OPD
PELAKSANAAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025
BULAN JULI DI OPD DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

I. DESKRIPSI PENYELENGGARAAN RAKOR

A. Waktu Penyelenggaraan Rakor

Kamis, 7 Agustus 2025

B. Pimpinan Rakor

Kepala Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah

C. Peserta Rakor

1. Sekretaris
2. Kepala Bidang
3. Kepala UPTD
4. Kepala Sub Bagian
5. Sub Koordinator
6. Bendahara Pembantu
7. Bendahara Pelaksana Pembantu
8. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
9. Pelaksanan pada masing-masing unit kerja

D. Notulis

Sub Bagian Program

II. KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN BULAN INI

A. Realisasi sampai dengan bulan ini

a. Fisik = 56,20 %

b. Keuangan = 10.430.980.501 (50,12%)

B. Kegiatan yang berdeviasi fisik

No	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)	Target Fisik (%)	Realisasi		Deviasi Fisik (%)	Ket
				Fisik (%)	Keuangan (Rp)		
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	32.533.000			20.592.000		
1	Fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan	24.680.000	75,52	70,40	18.666.000	(5,12)	
2	Konsultasi keterpaduan pusat dan daerah	7.853.000	49,10	24,85	1.926.000	(24,25)	perjalanan dinas luar daerah menyesuaikan kebutuhan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.610.728.000			6.995.591.154		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.610.728.000	64,43	62,53	6.995.591.154	(1,90)	

Administrasi Umum Perangkat Daerah							
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	58.580.000			48.550.000		
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	58.580.000	82,93	75,59	48.550.000	(7,34)	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	10.727.000			300.000		
1	Pelayanan Informasi	10.727.000	2,70	1,20	300.000	(1,50)	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36.200.000			8.131.000		
1	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kota	36.200.000	48,09	24,04	8.131.000	(24,05)	Realisasi menyesuaikan kebutuhan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	303.200.000			162.618.126		
1	Pelaksanaan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	303.200.000	58,10	57,60	162.618.126	(0,50)	
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan							
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN							
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi							
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	5.470.000			715.000		
1	Konsultasi PUG	5.470.000	36,56	13,07	715.000	(23,49)	perjalanan dinas menyesuaikan kebutuhan
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA							
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi							
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	31.026.000			11.882.500		
1	Sosialisasi Peningkatan Ketahanan Keluarga Kabupaten/Kota	14.000.000	30	27,54	3.855.000	(2,46)	
2	Layanan Edukasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Penjangkauan Penguatan Keluarga	17.026.000	54,80	50,16	8.027.500	(4,64)	
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak							
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)							
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi							
	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak	4.682.000			600.000		

	Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota						
1	Jejaring Partisipasi Anak secara Inklusif	4.682.000	100	13	600.000	(87)	kegiatan akan dilaksanakan agustus karena menyesuaikan agenda Bunda FAN Jateng
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK							
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota							
	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK Kewenangan	33.760.000			11.400.000		
1	Pelaksanaan Pelatihan Manajemen Kasus KtPA/TPPO	33.760.000	66,66	33,33	11.400.000	(33,33)	2x kegiatan akan dikolaborasikan dengan kegiatan UNICEF.
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Keluarga Berencana, Advokasi, dan KIE							
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)							
Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal							
	Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	82.113.000			62.077.420		
1	Safari Pelayanan KB MKJP	82.113.000	75,51	55,88	62.077.420	(19,63)	
	Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	306.072.000			129.195.219		
1	Advokasi Peningkatan Kesertaan KB Perusahaan	22.876.000	69,45	60,18	15.887.000	(9,27)	
2	Pengembangan Konten Media KIE	83.196.000	50,26	43,26	41.815.719	(7,00)	Karena ada anggaran gaji non asn atas nama Aji Nugroho yang kini sudah diangkat PPPK
3	Percepatan Penurunan Stunting	200.000.000	37,50	35,84	71.492.500	(1,66)	
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPT Perlindungan Perempuan danÂ Anak							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	182.139.000			112.171.420		
1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	182.139.000	61,59	46	112.171.420	(15,59)	
Administrasi Umum Perangkat Daerah							

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20.700.000			11.935.500		
1	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20.700.000	57,66	50,36	11.935.500	(7,30)	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	39.537.000			17.184.000		
1	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Internet UPTD PPA	39.537.000	43,46	34,38	17.184.000	(9,08)	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	203.371.000			124.390.831		
1	Penyediaan Jasa Kebersihan	51.743.000	61,13	56,27	31.622.706	(4,86)	
2	Penyediaan Jasa Keamanan	151.628.000	61,16	56,21	92.768.125	(4,95)	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.000.000			0		
1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.000.000	10,38	0	0	(10,38)	
	Jumlah SSK dengan Deviasi Fisik Negatid s/d Bulan ini :	22	0	0			
	Jumlah SSK dengan Anggaran yang di 0 kan :	0	0	0			

III. PERMASALAHAN DAN HAMBATAN SERTA UPAYA PENYELESAIANNYA

Permasalahan

1. Juknis untuk pemantauan dan evaluasi stunting dari pusat belum terbit (KIE);
2. Hasil Survey SSGI baru rilis di bulan Juni dan masih ada 6 kab/kota yang datanya masih kosong (KIE).

Upaya

1. Koordinasi dengan TPPS Pusat, Provinsi dan kab/kota terkait juknis dan hasil survey SSGI (KIE).

IV. RENCANA KERJA BULAN BERJALAN

1. Layanan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak (UPTD);
2. ToT Fasilitator RPPA di Semarang dengan peserta PLKB dari 35 kab/kota (PP);
3. Advokasi Pembentukan Gugus Tugas TPPO di kab/kota (2 lokasi) (PP);
4. 2x Pelatihan Manajemen Kasus KtPA/TPPO (PA);
5. Penguatan PUG bagi Kab/Kota (KG);
6. PPEP Tahap 3 di 3 lokasi (KG);
7. Dikpol rencana di 8 lokasi (KG);
8. Sosialisasi Implementasi Serat Kartini di Semarang (KG);
9. Sosialisasi TPK2D (KG);
10. Ngopi Penak (KG);
11. Monev TPPS di Kab/Kota (KIE);
12. Bimtek Pelaksanaan dan Pelaporan Aksi Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting. kegiatan kolaborasi dengan bappeda (KIE);
13. Safari Pelayanan KB MKJP di 3 lokasi (KB);
14. Jejaring Partisipasi Anak secara Inklusif (PHA);

15. Sosialisasi Gerakan Jo Kawin Bocah dalam rangka Penurunan Angka Stunting dan AKI pada Kelompok PIK Remaja di Kampung KB di Kab. Brebes (KS);
16. Advokasi Pendidikan Kependudukan dalam Rangka Gerakan Jo Kawin Bocah serta Cegah AKI dan Stunting di 2 lokasi (Pati dan Kudus) (Dalduk);
17. Jejaring Partisipasi Anak secara Inklusif (PHA).

V. PENUTUP

Stressing Pengendalian

1. Masing-masing pimpinan pada unit kerja memantau indikator kinerja serta realisasi keuangan/fisiknya
2. ApabilaÂ target kinerja fisik maupun keuangan belum bisa terpenuhi, dimohon untuk menjelaskan permasalahan dan upaya pemecahannya dalam narasi yang singkat dan jelas;
3. Para Pejabat eselon 3 dan 4 serta sub koordinator masing-masing Bidang/Seksi, agar memperhatikan capaian target kinerja mulai dari indikator tujuan, sasaran, kegiatan, sub kegiatan sampai dengan sub sub kegiatan;
4. Masing-masing unit kerja/pemilik resiko pada bidang dan sekretariat, agar memperhatikan manajemen resiko yang sudah dibuat dan menjalankan rencana tindak pengendaliannya secara optimal;
5. Pencapaian target-target indikator dalam RPJMD dan RKPD harus semaksimal mungkin karena sudah memasuki tahap akhir pelaksanaan RPJMD;
6. Dimohon masing-masing bidang/seksi dan sekretariat mencermati kembali Rancangan kegiatan (target dan sasaran) dengan memperhatikan isu prioritas (nasional dan provinsi) serta isu strategis lainnya;
7. Semua kegiatan diarahkan untuk mendukung program prioritas Gubernur baru

Demikian laporan pelaksanaan rapat koordinasi pengendalian pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah bulan Juli 2025, untuk menjadikan periksa.

Semarang, Kamis, 7 Agustus 2025

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEREMPUAN DAN ANAK

Dra. EMA RACHMAWATI, M.Hum

NIP. 196605171990082001